



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 3858-3867

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Sofhi Fiona Grecia Pakpahan^{1✉}, Dedi Kusuma Habibie²

Administrasi Publik, Universitas Riau

Email : sofhi.fiona4506@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan narapidana penting untuk memastikan efektivitas rehabilitasi serta pencegahan residivisme. Program pembinaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan psikologis, keterampilan, pendidikan, dan keagamaan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan narapidana. Namun, masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat tersebut meliputi kondisi overkapasitas penghuni lapas, keterbatasan jumlah staf pembinaan, serta rendahnya tingkat kesadaran narapidana dalam mengikuti program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, dan pendekatan yang lebih personal dalam pelaksanaan pembinaan agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci : *Evaluasi, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru*

Abstract

Evaluation of inmate rehabilitation programs is essential to ensure effective rehabilitation and reduce the risk of recidivism. These programs must address the psychological, educational, vocational, and religious needs of inmates. This study aims to assess the effectiveness and identify obstacles in the implementation of rehabilitation programs at Class II A Correctional Facility in Pekanbaru. Using William N. Dunn's policy evaluation theory, this research applies a descriptive qualitative method through observation, interviews, and documentation. The findings show that rehabilitation programs are implemented based on principles of rehabilitation, social reintegration, and inmate empowerment. However, several barriers remain, including overcrowded prison conditions, a shortage of rehabilitation staff, and low inmate awareness of the importance of program participation. To improve effectiveness, it is necessary to enhance human resources, improve facilities, and apply more personalized approaches, ensuring that rehabilitation goals within the correctional system are successfully achieved.

Keyword: *Evaluation, Inmate Rehabilitation, Correctional Facility, Pekanbaru*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas dan mutu sumber daya manusia harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal (Suparmoko, M., 2020). Selain membangun sistem ekonomi yang kokoh, tantangan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah tingginya angka kriminalitas yang semakin meluas (Kasma dkk, 2024). Kejahatan sebagai salah satu aspek permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum akan terus ada selama peradaban manusia berlangsung.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk atas semangat kebangsaan untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menegaskan bahwa segala aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Salah satu perwujudan prinsip negara hukum adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi narapidana (Pakpahan dkk, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem ini bertujuan untuk membina narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik, menyadari kesalahan, dan mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan menekankan pada dua aspek penting, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup peningkatan kualitas spiritual, moral, dan intelektual narapidana, sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan membekali mereka dengan keterampilan hidup yang berguna setelah menjalani masa pidana. Kedua aspek ini menjadi landasan utama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.

Secara yuridis, ketentuan mengenai pembinaan narapidana diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjelaskan tahapan pembinaan narapidana meliputi tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Setiap tahap memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang terstruktur untuk menjamin efektivitas pembinaan yang diberikan.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Tahun 2024, jumlah narapidana di seluruh UPT Pemasyarakatan di Riau mencapai 14.955 orang, sementara kapasitas hanya 4.555 orang. Artinya, terjadi *overcapacity* lebih dari tiga kali lipat, yang tentunya berdampak pada efektivitas pembinaan, kualitas pelayanan, serta keamanan dan kenyamanan warga binaan maupun petugas.

Kondisi tersebut juga dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yang memiliki kapasitas 771 orang tetapi menampung hingga 1.333 narapidana. LAPAS ini merupakan salah satu unit pemasyarakatan strategis di Riau, karena berlokasi di pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tujuan utama dari Lapas ini adalah melaksanakan fungsi pembinaan secara holistik, baik dalam aspek kepribadian maupun kemandirian, dengan pendekatan edukatif, korektif, dan rehabilitatif.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Pekanbaru meliputi penyuluhan sadar hukum, penguatan nilai-nilai Pancasila, pendidikan keagamaan, serta layanan psikologis dan kesehatan mental. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan pertanian hidroponik, perikanan, peternakan, pengelasan, pertukangan, dan keterampilan barista, serta program pendidikan formal seperti paket A–C. Kegiatan ini dirancang agar narapidana memiliki bekal keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk kembali ke masyarakat secara produktif.

Namun demikian, dalam implementasinya, berbagai hambatan masih sering ditemukan. *Overcapacity* penghuni, keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas pembinaan, serta minimnya sarana dan prasarana pelatihan menjadi kendala utama dalam optimalisasi program pembinaan. Selain itu, keberagaman latar belakang narapidana, baik dari segi jenis

tindak pidana, usia, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis, menuntut pendekatan pembinaan yang lebih personal dan adaptif.

Data terakhir menunjukkan bahwa mayoritas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah kasus narkoba (877 orang), diikuti oleh kasus perlindungan anak (148 orang) dan pencurian (108 orang), dll. Hal ini menandakan perlunya program pembinaan yang responsif terhadap jenis tindak pidana yang dominan, terutama dalam menangani masalah kecanduan, trauma psikologis, dan reintegrasi sosial pasca hukuman.

Penyelenggaraan pembinaan narapidana sangat diperlukan untuk reintegrasi narapidana ke masyarakat, maka dari itu diperlukan adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan. Menurut Prabowo dkk, (2022), Kemajuan dari suatu program yang terdapat pada suatu kebijakan dapat dilihat melalui evaluasi.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program, faktor penghambat, serta implikasi kebijakan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemangku kebijakan dalam merancang program pembinaan yang lebih adaptif, humanis, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahamai pemahaman yang mendalam mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam fenomena sosial dan lingkungan secara natural, dengan peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data (Creswell (2018)). Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika penyelenggaraan pembinaan narapidana, termasuk berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh narapidana maupun pihak lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan proses pembinaan tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga teknik utama, yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data/ kesimpulan. Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data (Fatmawati,

2024), jenis dan sumber data yang digunakan ialah primer (pengamatan dan wawancara) dan sekunder (dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu (jurnal), dan berita online).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Lembaga Permasarakatan No.19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019) , yaitu informan dipilih dengan sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik atau tujuan penelitian. Yang menjadi informan penelitian diantaranya yaitu : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, narapidana, beserta keluarga narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasian terkait penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan untuk memastikan setiap narapidana mendapatkan hak nya dalam mengikuti setiap penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan narapidana dilembaga pemasarakatan merupakan proses penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap narapidana agar tidak melakukan kesalahan yang sama saat telah menyelesaikan masa hukuman.

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran bagaimana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam melakukan perannya dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan pembinaan narapidana. Untuk itu penelitian ini mengkaji evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003). Adapun indikator-indikator dalam mengukur Evaluasi Kebijakan diantaranya : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.

Penyelenggaraan pembinaan narapidana yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian menunjukkan tingkat efektivitas yang signifikan dalam mendukung tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pengurangan residivisme. Pembinaan kepribadian yang berfokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral, serta pembinaan kemandirian yang memberikan keterampilan praktis, memberikan peluang bagi narapidana

untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan sosial setelah masa hukuman mereka.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan pembinaan mengalami beberapa kendala, terutama terkait dengan *overcapacity* yang mempengaruhi optimalisasi proses pengamatan dan pengenalan lingkungan pada tahap awal pembinaan. Keterbatasan waktu pada tahap ini berdampak pada pengurangan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi narapidana, yang seharusnya dilakukan selama satu bulan namun hanya dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.

Pada tahap lanjutan dan akhir, program pembinaan berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan persiapan reintegrasi sosial, yang dirancang untuk membantu narapidana mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Penilaian terhadap keberhasilan program pembinaan dilakukan dengan menggunakan instrumen yang komprehensif, yang mencakup aspek-aspek pembinaan kepribadian, kemandirian, kesehatan mental, sikap, serta minat dan bakat narapidana.

Penyelenggaraan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru menunjukkan upaya yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung kegiatan pembinaan. Fasilitas dasar seperti makanan, minuman, dan perlengkapan belajar tercukupi, namun keterbatasan fasilitas pembinaan, seperti ruang yang terbatas akibat overkapasitas penghuni, menghambat efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Fasilitas olahraga dan kegiatan keagamaan sudah tersedia dengan baik, meskipun fasilitas ibadah untuk agama Hindu masih terbatas karena jumlah narapidana yang menganut agama tersebut relatif sedikit.

Keterbatasan jumlah petugas pembinaan juga menjadi faktor penghambat, karena dengan jumlah petugas yang terbatas, mereka harus mengelola sejumlah besar narapidana, yang mempengaruhi kualitas pembinaan. Selain itu, meskipun waktu yang tersedia untuk pembinaan cukup, jadwal yang kadang mengalami penyesuaian menandakan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan waktu, meskipun disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan fasilitas.

Secara keseluruhan, efisiensi dalam penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru masih terhambat oleh masalah overkapasitas dan keterbatasan SDM. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya, seperti penambahan jumlah petugas, pengelolaan ruang yang lebih optimal, serta penanganan masalah overkapasitas secara lebih efektif.

Program pembinaan dinilai cukup dalam memberikan bekal dasar bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah bebas. Namun demikian, kecukupan program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat

tantangan struktural, seperti keterbatasan jumlah petugas pembina yang berdampak pada kurangnya pendampingan secara individual. Selain itu, kecukupan juga belum mencakup secara menyeluruh fase pasca-pembebasan, yang mana narapidana masih menghadapi kendala dalam hal reintegrasi sosial, pencarian kerja, serta penerimaan oleh keluarga dan masyarakat. Secara substansi program pembinaan telah memadai, efektivitasnya sangat bergantung pada kesinambungan dukungan setelah narapidana bebas. Diperlukan pendekatan yang lebih integratif dengan melibatkan aktor eksternal seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya untuk memperkuat proses reintegrasi sosial dan memastikan keberlanjutan rehabilitasi narapidana di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Penyesuaian program pembinaan berdasarkan kebutuhan individu telah diterapkan sebagai bentuk pendekatan yang inklusif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas dan kegiatan pembinaan. Beberapa narapidana memiliki keterbatasan dalam mengikuti program karena ketiadaan barang penunjang pembinaan yang tidak disediakan oleh Lapas, seperti perlengkapan olahraga. Selain itu, faktor kondisi kesehatan dan usia lanjut juga menjadi hambatan dalam partisipasi penuh narapidana terhadap program yang ditawarkan.

Dengan demikian, meskipun secara kebijakan Lapas telah berkomitmen pada prinsip pemerataan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan personal. Diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inklusif agar semua narapidana dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembinaan, guna mendukung proses rehabilitasi yang menyeluruh dan berkeadilan.

Responsivitas dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru menunjukkan adanya komitmen institusi dalam merespons kebutuhan, keluhan, dan masukan dari narapidana maupun keluarga mereka. Mekanisme penyampaian aspirasi melalui forum komunikasi dan interaksi rutin telah memberikan ruang bagi narapidana untuk menyuarkan permasalahan yang mereka hadapi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas secara proaktif. Hubungan yang terjalin antara petugas dan warga binaan juga mencerminkan pendekatan yang suportif dan humanis dalam proses pembinaan.

Selain itu, keterbukaan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru terhadap masukan dari keluarga narapidana menjadi indikator penting bahwa responsivitas tidak hanya difokuskan pada internal lembaga, tetapi juga menjangkau elemen eksternal yang berkaitan erat dengan proses reintegrasi sosial narapidana. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam bentuk keterbatasan komunikasi antara pihak keluarga dan Lapas, yang

dapat menghambat efektivitas penyampaian aspirasi secara menyeluruh.

Program pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dinilai telah berjalan dengan tepat sasaran, baik dari perspektif narapidana maupun keluarga mereka. Ketepatan ini tercermin dalam keberhasilan program dalam membentuk perilaku disiplin, memperbaiki sikap, serta mengembangkan keterampilan narapidana yang relevan dengan kehidupan pasca-pemidanaan.

Berdasarkan hasil wawancara, narapidana merasakan manfaat langsung dari pembinaan yang diberikan, baik dalam bentuk pembinaan kepribadian seperti peningkatan nilai-nilai religius dan kedisiplinan, maupun pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan. Bahkan, beberapa narapidana menunjukkan kemampuan untuk berbagi ilmu kepada sesama, yang menjadi indikator keberhasilan program dalam membentuk individu yang produktif dan memiliki nilai sosial.

Selain itu, pengakuan dari pihak keluarga juga memperkuat temuan bahwa program pembinaan yang diberikan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku dan kesiapan narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah pembebasan. Program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan ini mendorong narapidana untuk lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan positif selama masa pidana.

➤ Faktor Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas program pembinaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan tiga faktor utama yang menjadi penghambat, yaitu overkapasitas penghuni, kekurangan staf pembinaan, serta rendahnya kesadaran dan motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan.

Pertama, overkapasitas penghuni mengakibatkan keterbatasan ruang kamar dan fasilitas pendukung pembinaan. Narapidana yang melebihi kapasitas hunian menyebabkan mereka harus berbagi kamar dalam jumlah besar, sehingga menciptakan kondisi yang kurang kondusif untuk proses rehabilitasi. Selain itu, fasilitas pembinaan seperti sarana olahraga dan pelatihan keterampilan harus digunakan secara bergiliran, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan pemerataan partisipasi program.

Kedua, kurangnya jumlah staf pembinaan menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program yang bersifat individual maupun kelompok. Dengan jumlah narapidana yang besar

dan staf yang terbatas, pendekatan pembinaan menjadi tidak optimal. Staf tidak mampu memberikan pendampingan yang intensif dan terarah bagi setiap individu, keberhasilan program sangat bergantung pada perhatian dan interaksi yang bersifat personal dalam membentuk perilaku dan keterampilan narapidana.

Ketiga, rendahnya kesadaran narapidana terhadap pentingnya mengikuti program pembinaan turut menjadi faktor penghambat. Kurangnya motivasi, tidak adanya kecocokan minat terhadap jenis pembinaan, hingga keterbatasan fasilitas pribadi seperti perlengkapan olahraga atau bahan pelatihan menjadi penyebab rendahnya partisipasi aktif narapidana dalam program. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih partisipatif dan pemetaan minat narapidana dalam merancang program pembinaan yang lebih kontekstual dan menarik.

Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menurunkan efektivitas penyelenggaraan pembinaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan strategi yang menyeluruh seperti penambahan kapasitas fisik, peningkatan jumlah dan kompetensi staf pembinaan, serta pendekatan motivasional yang lebih kuat terhadap narapidana. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa tujuan utama dari pembinaan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara maksimal.

SIMPULAN

Penyelenggaraan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru menunjukkan upaya signifikan dalam mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang membantu narapidana memperbaiki perilaku dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah bebas. Namun, terdapat faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan program, seperti overkapasitas penghuni yang membatasi ruang dan fasilitas pembinaan, kekurangan staf pembinaan yang mengurangi kualitas pendampingan, serta rendahnya kesadaran dan motivasi narapidana dalam mengikuti program. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan jumlah staf, fasilitas, dan pendekatan yang lebih partisipatif terhadap kebutuhan individu, serta keterlibatan lebih banyak pihak eksternal untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Creswel J. W, and Creswell J. D, (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*, SAGE Publications, Inc., USA.
- Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fatmawati, E., & Roni, M. (2024). Bagaimana Lingkungan Kerja Karyawan di Dinas Sosial Kota Palembang. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 265-281.
- Kasma, J. A. & Sari, Y. P. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Indonesia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press
- Pakpahan, Z. A., Hasibuan, W. G. M., Nasution, H., & Pakpahan, I. (2023). KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK AZASI NARA PIDANA SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS III KOTAPINANG. *Warta Dharmawangsa*, 17(4).
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8). <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (4rd ed)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*